

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan keragaman, memiliki lanskap budaya politik yang unik dan dinamis. Latar belakang budaya politik Indonesia merupakan mozaik kompleks yang terbentuk dari interaksi berbagai faktor sepanjang sejarah. Selain itu, nilai-nilai tradisional seperti gotong royong dan musyawarah mufakat, yang masih kuat mengakar dalam masyarakat turut mewarnai praktik politik sehari-hari. Demokrasi lokal yang berfokus pada partisipasi masyarakat di tingkat daerah merupakan manifestasi dari interaksi antara budaya lokal dan praktik demokrasi. Budaya lokal seperti Martutur di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat mendukung demokrasi. Dalam tradisi ini, seluruh anggota masyarakat berpartisipasi dalam diskusi untuk menentukan calon pemimpin atau kebijakan publik. Proses ini tidak hanya memberikan ruang bagi suara masyarakat tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi kolektif (Sinaga & Ivanna, 2024).

Di wilayah Jawa Barat, masyarakat Sunda dikenal menjunjung tinggi nilai *silih asah, silih asih, silih asuh*, nilai-nilai yang mengedepankan saling memperbaiki, saling menyayangi, dan saling membimbing. Nilai-nilai ini tidak hanya mewarnai kehidupan sosial, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kolektif, termasuk dalam politik lokal.

Musyawarah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Sunda, dan sering kali proses politik dijalankan dengan prinsip kekeluargaan dan kesepakatan bersama, bukan semata-mata didasarkan pada mayoritas suara. Fenomena ini mencerminkan bahwa demokrasi dalam lokal tidak selalu identik dengan mekanisme formal seperti pemungutan suara, melainkan dapat berbentuk deliberasi adat yang mengakar kuat pada nilai-nilai budaya dan adat.

Budaya lokal merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwariskan secara turun temurun dalam suatu komunitas. Budaya ini mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, bahasa, kesenian, hingga praktik sosial yang menjadi identitas khas suatu kelompok masyarakat. Budaya lokal tidak hanya meliputi aspek fisik seperti rumah adat, pakaian tradisional, atau seni pertunjukan, tetapi juga mencakup sistem nilai, pola komunikasi, mekanisme penyelesaian konflik, dan cara masyarakat mengambil keputusan secara kolektif. Dalam politik, budaya lokal dapat memengaruhi bagaimana masyarakat menafsirkan kekuasaan, memandang figur pemimpin, dan menentukan arah partisipasi dalam proses politik.

Di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, budaya lokal tidak serta-merta terpinggirkan. Sebaliknya, dalam banyak komunitas adat, budaya lokal justru menjadi mekanisme adaptif yang mampu bersinergi dengan sistem demokrasi modern. Interaksi antara sistem nilai lokal dan sistem demokrasi nasional menciptakan model demokrasi yang khas, yang disebut sebagai demokrasi lokal berbasis budaya. Model ini memungkinkan

terjadinya proses politik yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial, karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan diyakini secara kolektif.

Salah satu representasi nyata dari keberlanjutan budaya lokal tersebut dapat ditemukan di Kampung Adat Kranggan yang terletak di Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Kampung ini merupakan *enclave* budaya Sunda di tengah arus urbanisasi Jakarta dan sekitarnya. Meskipun secara administratif masuk wilayah perkotaan, masyarakat di Kampung Adat Kranggan tetap mempertahankan struktur sosial tradisional yang berpijak pada nilai-nilai adat. Tokoh adat, atau yang disebut Olot, masih memiliki posisi sentral dalam proses sosial, spiritual, dan politik masyarakat. Kehadiran pemangku adat seperti Abah Olot Kisan menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan tradisional tetap hidup dan menjadi rujukan moral sekaligus politik dalam masyarakat tersebut.

Dalam konteks demokrasi lokal, budaya politik masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan dinamika proses pemilihan walikota Bekasi. Kampung Adat Kranggan, yang terletak di Kota Bekasi, menjadi sebuah contoh menarik dari interaksi antara nilai-nilai tradisional dan praktik demokrasi modern. Pada pemilihan walikota Bekasi tahun 2024, masyarakat adat di kampung ini tidak sekadar mengikuti arahan dari tokoh-tokoh masyarakat, melainkan menunjukkan keterlibatan aktif melalui diskusi-diskusi lokal yang membahas rekam jejak, visi-misi, dan kontribusi calon pemimpin terhadap masyarakat.

Fenomena diskusi yang terbuka dan kritis ini memperlihatkan adanya proses pertukaran pendapat dan evaluasi yang mendalam di kalangan masyarakat adat. Meskipun begitu, arah pilihan politik warga tetap terkait erat dengan struktur sosial dan budaya yang telah lama ada. Sebagaimana berdasarkan berita portal Pikiran Rakyat Bekasi, pada Pemilu Legislatif 2024, seorang anggota DPRD Kota Bekasi yaitu Anim Imanuddin, S.E., M.M dari partai PDIP berhasil memperoleh 14.287 suara, yang juga merupakan adik kandung dari pemangku adat Kranggan (Kusnaedi, 2024). Posisi sosial keluarga tersebut yang memiliki kedudukan penting dalam komunitas turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses politik di tingkat lokal.

Keterpilihan anggota dewan ini mengindikasikan bahwa diskusi masyarakat tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh nilai-nilai adat dan struktur sosial yang melekat. Sebaliknya, pengaruh tersebut diolah dan direspon dalam kerangka demokrasi yang lebih terbuka, dimana masyarakat mampu melakukan penilaian secara rasional berdasarkan informasi yang diperoleh melalui dialog dan interaksi sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa budaya politik di Kampung Adat Kranggan mengalami perkembangan yang kompleks, di mana tradisi dan modernitas saling berinteraksi secara dinamis.

Hal tersebut diperkuat melalui temuan awal yang peneliti peroleh saat melakukan studi pendahuluan melalui wawancara pada hari Selasa, 4 Februari 2025 dengan Abah Olot Kisan selaku pemangku adat Kampung

Adat Kranggan, dalam kesempatan tersebut beliau menjelaskan bahwa diskusi-diskusi rutin diadakan sebagai bentuk perwujudan demokrasi, khususnya sila ke-4 Pancasila dalam rangka mencapai tujuan bersama. Beliau menjelaskan bahwa menjelang pemilihan walikota tahun 2024, diskusi serupa juga dilakukan, seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Diskusi ini bertujuan untuk menelaah latar belakang para calon walikota Bekasi, terutama terkait komitmen mereka terhadap adat istiadat dan budaya. Namun, Abah Olot Kisan menegaskan bahwa sebagai pemangku adat, beliau membuka ruang diskusi yang luas agar tercipta dialog yang bebas dan terbuka dari masyarakat. Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, diskusi yang beliau fasilitasi memberikan kesempatan bagi semua suara untuk didengar tanpa adanya tekanan atau paksaan.

Pada pemilihan walikota, hasil suara yang dilaporkan dari TPS 006 dan 007 Kelurahan Jatirangga menunjukkan perbedaan signifikan yakni pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 106 suara, nomor urut 2 meraih 29 suara, dan pasangan calon nomor urut 3 mendulang 340 suara. Diskusi-diskusi semacam ini biasanya terbuka bagi warga mulai usia 15 tahun, namun khusus untuk diskusi mengenai pemilihan walikota, peserta dibatasi hanya bagi mereka yang memiliki hak suara.

Hal tersebut sejalan penelitian yang dilakukan oleh Algi Paris pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa masyarakat di Desa Pao, Kecamatan Tarwoang menunjukkan sikap yang terbuka terhadap berbagai pilihan dalam lingkungan sosial mereka. Selain itu, mereka juga memiliki

kesadaran yang tinggi terhadap berbagai isu politik, yang mencerminkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam dinamika politik di daerah tersebut (Paris, 2020).

Idealnya, budaya lokal di Indonesia yang bersinggungan dengan demokrasi mencerminkan partisipasi inklusif, di mana semua warga yang memiliki hak suara dapat menyampaikan pandangan secara rasional dan setara. Pemangku adat berperan netral sebagai fasilitator, menghormati perbedaan pendapat tanpa memberikan tekanan. Diskusi semacam ini seharusnya meningkatkan kesadaran politik, berfokus pada informasi akurat tentang calon dan berjalan transparan serta akuntabel. Namun, dalam kenyataannya proses diskusi yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh warga yang memiliki hak suara secara merata, partisipasi lebih didominasi oleh kalangan generasi tua. Selain itu, meskipun pemangku adat berupaya untuk bersikap netral, pengaruh dari pengalaman masa lampau terkadang masih terasa dalam dinamika diskusi.

Sehubungan dengan pembahasan di atas, budaya lokal di Kampung Adat Kranggan tidak hanya menjadi identitas komunitas, tetapi juga memainkan peran aktif dalam dinamika demokrasi lokal. Penelitian ini merupakan pengembangan keilmuan di masyarakat, khususnya dalam membentuk *civic community* yang relevan bagi pengembangan kajian pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan menganalisis bagaimana budaya politik masyarakat Kampung Adat Kranggan pada Pemilihan Walikota Bekasi tahun 2024.

B. Masalah Penelitian

Topik permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana budaya politik masyarakat di Kampung Adat Kranggan berdasarkan teori budaya politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Sydney Verba.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penetapan fokus dan subfokus dalam penelitian ini bertujuan untuk menjaga arah kajian tetap jelas dan terarah. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis peran budaya lokal di masyarakat Kampung Adat Kranggan dalam memengaruhi proses pemilihan walikota Bekasi tahun 2024. Sementara itu, subfokus penelitian diarahkan pada kajian terhadap budaya politik yang berkembang di lingkungan masyarakat Kampung Adat Kranggan.

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana budaya politik masyarakat di Kampung Adat Kranggan dalam pemilihan walikota Bekasi tahun 2024?
2. Bagaimana budaya lokal masyarakat di Kampung Adat Kranggan dalam pemilihan walikota Bekasi tahun 2024?

E. Manfaat Penelitian

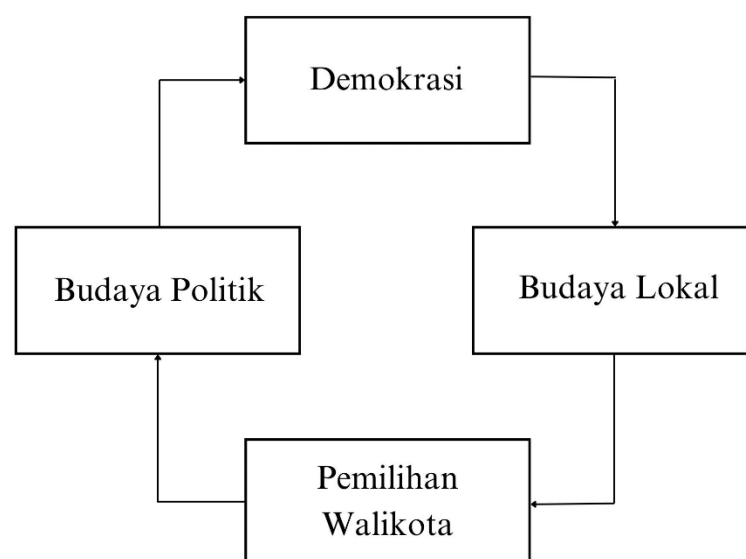
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik pada studi politik sebagai media dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu politik.

2. Manfaat Praktis

Sebagai alat bantu bagi KPUD dan Bawaslu untuk perumusan kebijakan yang memiliki arah kepada budaya lokal dan budaya politik masyarakat menjelang pemilihan walikota yang akan mendatang. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi organisasi *civil society* dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak politik mereka dan pentingnya keterlibatan dalam proses pemilihan.

F. Kerangka Konseptual



Bagan 1.1 Kerangka Konseptual